

PEMERINTAHAN SULTAN HASSANAL BOLKIAH DAN PERBANKAN ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM (1984-2015M)

Oleh:

¹Surti Nurpita Sari dan ²Herawati

¹Banyuasin, Ngawi. Email: Nurpitasurti77@gmail.com

² Dosen Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: hera_uin@yahoo.co.id

Abstract

Brunei Darussalam is one of the country in Southeast Asia that has a good stability in economic. Natural resources are managed effectively and supported by various government policies become the main factor in supporting the nation's economic progress. By the nation's foundation of the Malay Islamic Beraja Philosophy (Falsafah Melayu Islam Beraja or MIB, Sultan Hassanal Bolkiah issues various policies including economics policies. Therefore, it is not surprising if most of the policies in Brunei Darussalam are based on Islamic teachings. In the field of monetary for example, the Sultan establishes an Islamic bank named Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) to prevent the public from interest or usury (riba). Sultan also sets a high tax and even prohibits the circulation of various commodities forbidden in Islam, such as khamr (kinds of alcoholic drinks forbidden in Islam as like wine and liquor), and others.

Keywords: *Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, economic policy*

Abstrak

Brunei Darussalam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki iklim perekonomian yang stabil. Kekayaan alam yang dikelola secara efektif dan didukung berbagai macam kebijakan pemerintah menjadi penyokong utama kemajuan perekonomian bangsa. Dengan landasan bangsa berupa falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), Sultan Brunei Darussalam saat ini yakni Sultan Hassanal Bolkiah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Maka dari itu tidak heran jika sebagian besar kebijakan Sultan Brunei Darussalam dilandaskan pada ajaran Islam. Dalam bidang moneter misalnya, Sultan mendirikan bank Islam bernama Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) untuk menghindarkan masyarakat dari bunga atau riba. Sultan juga menetapkan pajak yang tinggi bahkan melarang peredaran berbagai komoditas yang diharamkan dalam Islam, seperti *khamr*, dan lainnya.

Kata Kunci : *Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, Kebijakan Ekonomi*

A. PENDAHULUAN

Sultan Hassanal Bolkiah merupakan sultan ke-29 Brunei Darussalam. Sultan menaiki takhta sejak tahun 1967 ketika Brunei Darussalam masih berada di bawah Protektorat Inggris. Tahun 1984 Brunei Darussalam mendapat kemerdekaan dan mulai berjuang sebagai negara yang mandiri dalam segala aspek, termasuk perekonomian. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada kekayaan alam berupa minyak dan gas alam. Namun demikian usaha pemerintah cukup keras untuk menghilangkan ketergantungan tersebut. Upaya Diversifikasi dilakukan demi kemajuan dan peningkatan perekonomian bangsa. Brunei Darussalam tercatat sebagai salah satu negara maju di Asia Tenggara dengan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.

B. KONDISI UMUM BRUNEI DARUSSALAM

Negara Brunei Darussalam (NBD) memiliki luas wilayah sekitar 5.875 km² dengan penduduk mencapai 393.372 jiwa (2011).¹ Terletak di ujung utara pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan dua wilayah Malaysia yakni Sabah serta Sarawak. NBD juga berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan di bagian utara. Letak astronomis NBD berada pada 4°LU-5°LU dan 114°BT-115°BT. Wilayah Brunei Darussalam terbagi menjadi empat daerah, yakni Muara-Brunei, Tutong, Temburong, dan Belait.

Masyarakat Brunei Darussalam terdiri dari berbagai suku yang heterogen, tetapi suku Melayu merupakan suku yang paling dominan. Bahasa melayu juga dijadikan sebagai bahasa resmi, di samping penggunaan bahasa Inggris yang juga masih kuat di Brunei Darussalam. Penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei Darussalam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh protektorat Inggris di negara ini.²

NBD menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Sistem pemerintahan ini dipercaya masyarakat Brunei Darussalam sebagai model sistem pemerintahan yang paling tepat untuk negara tersebut. Sejak abad ke-6 M, Brunei Darussalam telah menggunakan sistem *beraja*

¹Noor Hira Binti Haji Noor Kaseh, "Keharmonisan Asas Pembangunan Ummah di Negara Brunei Darussalam", makalah yang disampaikan pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) ke-38, 28-30 Oktober 2013, hlm. 7.

²Departement of Information, *Brunei in Brief* (Brunei Darussalam: Departement of Government Printing, 2013), hlm. 47.

(monarki absolut), bahkan setelah Islam masuk pada abad ke-11 M.³ Pada abad ke-14 M, Islam menjadi agama resmi di NBD setelah Sultan Awang Alak Betatar masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah.⁴ Islam kemudian menjadi aturan hidup bagi masyarakat Brunei Darussalam. Abad ke-19 M, Inggris datang ke Brunei Darussalam dan membuat perjanjian-perjanjian, hingga akhirnya menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara protektoratnya. Pengaruh Inggris sangat kuat di Brunei Darussalam, bahkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Sultan, harus mendapat persetujuan Residen Inggris. Masa kepemimpinan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967 M) menjadi masa awal perjuangan Brunei Darussalam untuk mendapat kemerdekaan. Perjuangan ini dilanjutkan oleh Sultan Hassanal Bolkiah, hingga akhirnya pada tahun 1984 M, Brunei Darussalam diberikan kemerdekaan oleh Inggris dan diakui sebagai negara yang berdaulat.

Secara umum, kondisi masyarakat Brunei Darussalam terbagi menjadi dua golongan besar, yakni kaum bangsawan dan non-bangsawan. Kehidupan sosial Brunei Darussalam tidak dapat dilepaskan dari aturan Islam. Banyak hukum Islam yang diadopsi sebagai aturan bermasyarakat di Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei Darussalam yang mayoritas muslim dan keberadaan Islam sebagai agama resmi negara menjadikan Islam sangat berpengaruh di sana. Meskipun dianut oleh sebagian besar masyarakat Brunei Darussalam, negara ini tidak melarang keberadaan agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, dan lain sebagainya.⁵

Perekonomian bangsa Brunei Darussalam ditopang oleh kekayaan alam berupa minyak dan gas alam yang melimpah. Dalam menjalankan proyek pembangunan ekonominya, Brunei Darussalam membuat Rancangan Kemajuan Negara (RKN) sebagai acuan. Melalui RKN ini, Sultan melakukan berbagai pembangunan untuk

³Berdasarkan bukti arkeologis berupa Tarsilah atau Selasilah Brunai. Tarsilah merupakan prasasti atau batu yang berisi tulisan yang di dalamnya memuat silsilah raja-raja Brunei Darussalam selama masa pemerintahan Islam. Bentuknya seperti sebuah cermin, dan terbuat dari batu pasir. Pada bagian pinggirnya terdapat hiasan sulur dan tiga bunga yang masing-masing di pinggir serta bagian atas. Ruliyadi, "Brunei Darussalam di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V (1485-1524)", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, Tidak dipublikasikan, hlm.19.

⁴Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 7, No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 54-55.

⁵Presentase penduduk Brunei Darussalam berdasarkan agama yakni sekitar 75,1% penduduk yang beragama Islam, 9,4% beragama Kristen, 8,6% beragama Buddha, sisanya yakni 6,9% menganut agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan lainnya. Pew Research Center, "The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010", Washington D.C., 2012, hlm. 45.

meningkatkan perekonomiannya. Brunei Darussalam juga masih menerapkan sistem ekonomi terbuka, sehingga para investor dari berbagai belahan dunia dapat menanamkan modalnya di Brunei Darussalam.⁶

C. BIOGRAFI SINGKAT SULTAN HASSANAL BOLKIAH

Sultan Hassanal Bolkiah merupakan sultan ke-29 Brunei Darussalam. Dilahirkan dari pasangan Sultan Omar Ali Saifuddin III dengan Pengiran Anak Damit pada tanggal 15 Juli 1946 di Istana Darussalam, Bandar Brunei (sekarang: Bandar Seri Begawan).⁷ Nama lengkap Sultan beserta gelarnya yakni Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.⁸

Sultan memperoleh pendidikan dasar Islam di surau Istana Darul Hana. Sejak tahun 1955, Sultan mulai menempuh pendidikan formal di Sekolah Melayu Sultan Muhammad Jamalul Alam (SMJA) di Bandar Brunei. Pendidikannya dilanjutkan di Sekolah Jalan Gurney di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1961. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Ia kembali ke Brunei Darussalam untuk dinobatkan sebagai putera mahkota. Pendidikan Sultan dilanjutkan di Victoria Institution dan pada tahun 1964 Ia kembali ke Brunei Darussalam untuk melanjutkan studi di Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin (SOAS). Pendidikannya kemudian berlanjut di Akademi Tentera Diraja, Sandhurst, England sejak 1966 M.⁹

Sultan Hassanal Bolkiah pernah menikah dengan 3 orang perempuan, namun hanya istri pertamanya yang saat ini tetap mendampingi. Istri pertamanya bernama Her Majesty (HM) Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dipersunting pada tahun 1965 M dengan menghasilkan 6 orang anak. Istri kedua bernama HRH Pengiran Isteri Mariam yang dinikahi pada tahun 1981 M. Meskipun dikaruniai 4 keturunan, namun pernikahan ini kandas tahun 2003. Istri ketiga bernama HRH Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar

⁶Salman Munthe, "Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 No. 2, September 2015, hlm. 108.

⁷Penggantian nama ini dilakukan tahun 1970 M untuk mengenang jasa Sultan Omar Ali Saifuddin III. Sultan Omar Ali Saifuddin memiliki gelar Paduka Seri Begawan Sultan.

⁸Untuk pembahasan selanjutnya memakai nama Sultan Hassanal Bolkiah.

⁹Awang Abdul Aziz bin Awang Juned, *Islam di Brunei: Zaman Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam* (Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei Darussalam, 1992), hlm. 1-3.

Hakim pada tahun 2005 M, namun kandas pada tahun 2010, meskipun sudah diberi 2 keturunan.¹⁰

Sultan Hassanal Bolkiah dinobatkan sebagai sultan Brunei Darussalam sejak tanggal 5 Oktober 1967. Pada saat itu Brunei Darussalam masih berada di bawah Protektorat Inggris, maka dari itu salah satu yang menjadi perhatian Sultan Hassanal Bolkiah ketika memimpin Brunei Darussalam adalah mendapat kemerdekaan negaranya. Sultan mengadakan beberapa perundingan dengan Residen Inggris untuk membicarakan tentang kedaulatan negara Brunei Darussalam.

Tahun 1971 M, disepakati perjanjian baru¹¹ antara Kesultanan Brunei Darussalam dan Kerajaan Inggris yang berisi tentang persetujuan Kerajaan Inggris untuk memberikan hak sepenuhnya bagi Brunei Darussalam untuk memiliki kerajaan sendiri. Perjanjian ini berlanjut dengan perjanjian Persahabatan dan Kerjasama yang ditandatangani Sultan Hassanal Bolkiah mewakili Brunei Darussalam dan Lord Goronwy-Roberts mewakili Kerajaan Inggris.¹² Perjanjian yang dilakukan pada 7 Januari 1979 di Lapau, Bandar Seri Begawan ini berisi pengakuan Inggris atas kedaulatan wilayah Brunei Darussalam dan memberikan kewenangan untuk mengatur hubungan dalam negeri serta luar negeri. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam menyatakan kemerdekaannya dari Inggris dan berdiri sebagai negara yang merdeka, dan berdaulat.

D. KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HASSANAL BOLKIAH

1. Arus Pendapatan Negara

Sumber pendapatan negara Brunei Darussalam berasal dari beberapa pos, yakni sumber daya alam, proses diversifikasi ekonomi, dan lain-lain. Pengelolaan pendapatan negara ini dilakukan oleh institusi negara bernama baitul mal. Baitul mal ini sudah

¹⁰<http://dcyberinfo.blogspot.co.id/2012/06/gambar-keluarga-diraja-brunei.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2016.

¹¹Brunei Darussalam telah melakukan perjanjian dengan Kerajaan Inggris pada tahun 1888 M yang berisi kesepakatan bahwa Kerajaan Inggris akan melindungi Brunei Darussalam dari upaya kristenisasi oleh Spanyol yang saat itu sudah berada di Filipina Selatan. Perjanjian ini dilanjutkan dengan kesepakatan pada tahun 1906 M yang menjadikan Inggris dapat ikut campur tangan langsung dalam pengelolaan negara Brunei Darussalam. Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara, jilid V* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 424.

¹²Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, *Melayu Islam Beraja: Hakikat dan Hasrat* (Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2008), hlm. 12-13.

dibentuk sejak tahun 1990 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Brunei Darussalam.

Sumber pendapatan yang pertama berasal dari sumber daya alam. Minyak dan gas alam menjadi sumber daya alam yang paling diandalkan di Brunei Darussalam. Keberadaan dua sumber daya alam ini menjadi tumpuan bagi pendapatan Brunei Darussalam. Sejak tahun 1928, Brunei Shell Petroleum (BSP) menemukan sumber minyak di daerah Seria. Pasca penemuan ini, minyak menjadi komoditas ekspor yang menguntungkan. Pada masa awal kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi di Brunei Darussalam kurang stabil dan ekspor minyak juga menurun. Kondisi ini berbalik sejak tahun 1999 dan seterusnya yang mana kondisi perekonomian Brunei Darussalam mulai stabil dan ekspor minyak meningkat. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari penemuan lokasi pengeboran minyak yang baru, yakni di Merpati dan Bagan. Negara utama yang mengimpor minyak dari Brunei Darussalam antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Singapura.¹³

Sementara produksi terhadap gas alam baru dimulai sejak tahun 1972. Produksi gas meningkat setelah satu dekade, bahkan Brunei Darussalam dinobatkan sebagai negara eksportir gas alam terbesar keempat di dunia. Sejak tahun 2000, pemerintah Brunei Darussalam membuat kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan gas. Regulasi ini mengatur tentang usaha peningkatan produksi dan ekspor gas alam, namun tetap memprioritaskan kebutuhan nasional. Negara utama pengimpor gas alam Brunei Darussalam adalah Jepang. Keberadaan gas sebagai salah satu tumpuan perekonomian Brunei Darussalam dinilai cukup menjanjikan. Sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan ini banyak dibutuhkan oleh negara-negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan untuk mengurangi kebutuhan terhadap minyak mentah.

Tahun 2009 M, minyak dan gas menyumbang sebesar 87% dari pendapatan Negara Brunei Darussalam. Terdapat empat perusahaan yang mendominasi produksi minyak dan gas di Brunei Darussalam. perusahaan tersebut, antara lain *Brunei Shell Petroleum* (gabungan saham dari *Royal Dutch Shell* dan Pemerintah Brunei Darussalam), Brunei LNG, *Brunei Coldgas* (gabungan saham dari *Royal Dutch Shell*,

¹³Abdul Malik Kamis dan Thirunaukarasu Subramaniam, "Sejarah Ekonomi Negara Brunei Darussalam", *JATI*, Volume 21, Desember 2016, hlm. 97-98.

Pemerintah Brunei Darussalam, dan *Mitsubishi Corporation*), dan *Brunei Shell Marketing*.

Selain bergantung pada sumber daya alam, Brunei Darussalam juga mengembangkan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi adalah penganekaragaman atau inovasi produk atau bidang usaha yang diyakini mampu menambah daya dorong perekonomian sebuah negara. Usaha ini dilakukan untuk kebutuhan untuk memperkecil resiko fluktuasi harga minyak dan kebutuhan untuk membuka lapangan pekerjaan baru karena pertumbuhan penduduk Brunei Darussalam yang cepat.¹⁴

Sejak tahun 1986 M, Brunei Darussalam melakukan usaha-usaha untuk melakukan variasi terhadap pemasukan negara. Negara kecil di Asia Tenggara ini berusaha melakukan pengembangan secara intensif terhadap beberapa industri, yakni industri pangan, properti, barang pecah-belah dan ubin, industri pakaian, semen, industri beton, industri obat-obatan, industri kayu, serta industri kaca. Industri pangan halal menjadi salah satu kebijakan yang mulai dikembangkan Brunei Darussalam sejak tahun 2007, dengan nama Brunei Halal. Pengembangan industri pangan halal ini tidak dapat dilepaskan dari usaha Sultan Hassanal Bolkiah untuk menjamin kehalalan makanan bagi penduduknya, sebagaimana Islam dalam mengatur masalah makanan. Di samping mengembangkan beberapa sektor perindustrian tersebut, Brunei Darussalam menyokong dengan pembukaan investasi asing, terutama untuk pembangunan daerah-daerah perindustrian.

Selain sektor perindustrian, sektor perhutanan juga menjadi perhatian bagi pemerintah Brunei Darussalam. Letak negara Brunei Darussalam yang berada di daerah katulistiwa menjadikan hutan Brunei Darussalam memiliki potensi yang besar. Wilayah Brunei Darussalam sebagian besar ditutupi oleh hutan yakni sekitar 81%. Terdapat banyak jenis hutan di Brunei Darussalam, mulai dari hutan mangrove, hutan gambut, rawa, padang rumput, dan lainnya. Meskipun potensi hutannya besar, tetapi Sultan menerapkan kebijakan pelarangan mengeksplor sumber daya alam dari hutan.

¹⁴Saiful Islam dan Zawawi Bahari, "Energi Commodities for Economic Growth of Brunei Darussalam", Makalah disampaikan dalam Third IAEE Asian Conference, International Association of Energy Economics dengan tema "Growing Energy Demand, Energy Security and the Environment in Asia". Jepang, 20-22 Februari 2012, hlm. 8.

Pemanfaatan hutan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri dengan izin dari pemerintah. Setiap tahun produksi kayu dibatasi hanya sebanyak 100.000 m².¹⁵

Selain beberapa pos pemasukan tersebut, Brunei Darussalam juga menjadikan zakat sebagai pendapatan negara. Meskipun demikian, pengalokasian zakat tetap disandarkan pada aturan Islam, sebab tidak sembarang orang dapat menerima harta zakat ini. Pendistribusian uang zakat ini dikembalikan sebagaimana Islam mengatur, yakni diberikan kepada 8 asnaf sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran terjemahan surat At-Taubah ayat 60,

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁶

Dari delapan asnaf penerima zakat tersebut, pemerintah Brunei Darussalam memprioritaskan tiga golongan yakni fakir, miskin, dan mualaf. Dana zakat yang telah terkumpul dijadikan satu dalam Kumpulan Wang Zakat. Dana zakat ini kemudian didistribusikan dalam bentuk bantuan-bantuan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Ada juga pos pendapatan yang bisa diperoleh negara dari hutang, terutama untuk melakukan berbagai proyek besar. Namun demikian, dalam pandangan Sultan, hutang merupakan salah satu beban yang bisa berakhir pada petaka. Sebab, dalam hutang, terjadi kesepakatan oleh kedua pihak, baik dalam bentuk bunga atau perjanjian yang mengikat. Maka dari itu, Brunei Darussalam tidak mengambil hutang untuk membiayai pengeluaran negaranya.¹⁷

2. Arus Pengeluaran Negara

Arus pengeluaran negara dapat dilihat dari Rancangan Kemajuan Negara (RKN) yang menjadi acuan bagi pembangunan negara. RKN pertama pascakemerdekaan dibuat tahun 1985 (RKN ke-5). Rencana pengembangan negara lima

¹⁵Shamim A. Shiddiqi, dkk. "Economic And Social Policies of Brunei: An Empirical Analysis", *Philippine Review of Economics and Business*, Volume XXXIII, No. 1, Juni 1996, hlm. 8-9.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 196.

¹⁷Jabatan Penerangan, *Kumpulan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tahun 2012* (Brunei Darussalam: Borneo Printers & Trading Sdn Bhd, 2015), hlm. 13.

tahunan ini memberi penekanan terhadap pengembangan industri pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas. Dalam RKN ini pemerintah bahkan telah merencanakan 500 buah proyek untuk menyejahterakan rakyat, dengan anggaran sebesar BND 3,700 juta. Upaya penyejahteraan rakyat ini dilakukan pemerintah dengan cara memaksimalkan sumber daya milik negara, mengalokasikan keuangan pada sektor produktif, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan memajukan perindustrian lokal.

Pemerintah Brunei Darussalam memberikan pengalokasian yang besar terhadap pelayanan sosial, yakni mencapai 29% dari seluruh anggaran negara. Sekitar 20% digunakan untuk mengurus kebutuhan umum, sementara untuk urusan transportasi dan perhubungan, pemerintah mengalokasikan 11%. Selain itu untuk keamanan, untuk fasilitas umum, untuk urusan perusahaan dan perdagangan, serta untuk lain-lain masing-masing 10%. Negara Brunei Darussalam juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengembangan agama Islam. Pendanaan ini meliputi pembuatan sekolah agama, pendirian masjid, dan kegiatan dakwah terhadap masyarakat non-muslim.

E. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan uang dan suku bunga. Penetapan kebijakan moneter ini ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selain itu pemerintah suatu negara berusaha menstabilkan harga dengan kebijakan moneter ini. Dengan demikian inflasi dapat ditekan. Dalam kebijakan moneter, pembahasan terkait mata uang dan institusi yang mengelola keuangan. Sebagai media tukar, mata uang memiliki posisi penting dalam perekonomian suatu negara. Selain itu mulai didirikan beberapa institusi untuk mengelola urusan keuangan ini.

1. Mata Uang Brunei Darussalam

Kebijakan Sultan Hassanal Bolkiah menyangkut mata uang Brunei Darussalam dapat dilihat dari Perjanjian Kesalingbolehtukaran Mata Wang dengan Singapura, dan Malaysia pada tahun 1967. Berdasarkan perjanjian ini, ketiga negara tersebut untuk saling menerima uang kertas dan koin tanpa biaya perubahan. Perjanjian dari ketiga negara ini bertahan hingga tahun 1973 M, ketika akhirnya Malaysia memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan tersebut. Sementara Brunei Darussalam dan Singapura tetap

melanjutkan perjanjian hingga saat ini. Perjanjian ini dianggap menguntungkan bagi keduanya, sebab dapat mempermudah aktivitas perdagangan, pariwisata, dan investasi.¹⁸ Sejak saat itu juga, tugas untuk melakukan pencetakan uang dilimpahkan kepada lembaga bernama *Brunei Currency Board* (BCB).

Pascakemerdekaan, Brunei Darussalam menerbitkan mata uang pada tahun 1989 M. Semua nominal mata uang kertas yang sebelumnya dicetak dengan gambar baru, yakni gambar Sultan Hassanal Bolkiah di bagian depan, dan gambar pemandangan Kampong Ayer di bagian belakang. Brunei Darussalam juga pernah melakukan pencetakan uang kertas edisi terbatas untuk memperingati Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun 1992 M. Pada tahun tersebut, Sultan Hassanal Bolkiah resmi bertahta selama 25 tahun sejak diangkat sebagai Sultan Brunei Darussalam tahun 1967 M. Mata uang edisi spesial ini memiliki nominal BND 25.¹⁹ Pada tahun 2004, BCB berganti nama menjadi *Brunei Currency and Monetary Board* (BCMB).

Pencetakan uang secara mandiri oleh pemerintah Brunei Darussalam merupakan bentuk berdaulatnya negara ini. Selain itu, penggunaan gambar Sultan di berbagai jenis uang menjadikan legitimasi kekuasaan tertinggi Brunei Darussalam berada di tangan sultan. Pemerintah Brunei Darussalam juga menampilkan beberapa gambar tempat penting di negara ini untuk mengenalkan kebudayaan yang ada di Brunei Darussalam.

2. Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)

Brunei Darussalam telah memiliki beberapa bank konvensional yang beroperasi sejak masa Residen Inggris. Berikut beberapa bank di Brunei Darussalam antara lain Standard Chartered Bank (1958), Baiduri Bank Berhad (1994), Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC), Malayan Banking Berhad (MayBank), RHB Bank Berhad (1965), United Overseas Bank Ltd., dan The National Bank of Brunei Darussalam (NBB). Tahun 1987, Sultan Brunei Darussalam melakukan penutupan terhadap NBB karena melakukan penipuan skala besar dalam manajemennya.

¹⁸Pelita Brunei, 5 Juli 2017.

¹⁹<http://www.ambd.gov.bn/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?> diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

Beberapa bank konvensional tersebut menggunakan sistem bunga. Sistem bunga atau sistem riba ini sebenarnya bertentangan dengan falsafah Negara Brunei Darussalam yang menjadikan Islam sebagai peraturan hidup. Maka dari itu Sultan Hassanal Bolkiah kemudian mengeluarkan titahnya pada tahun 1990 M untuk pendirian sebuah bank yang tidak menggunakan sistem ribawi. Pada Persidangan Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) keempat di KHEUB, Bandar Seri Begawan pada tanggal 25 September 1990, Sultan menyampaikan bahwa keberadaan bank-bank Islam merupakan sebuah fardhu kifayah, sehingga Brunei Darussalam juga harus menunaikan kewajiban ini untuk mengurus bidang keuangan Islam. Selain itu, keberadaan bank Islam juga diyakini mampu memaksimalkan potensi masyarakat Brunei Darussalam yang mayoritas muslim, serta dapat mengurangi dampak krisis ekonomi melalui mekanisme pengaturan ekonomi dalam Islam.

Keberadaan bank Islam menurut Sultan Hassanal Bolkiah adalah suatu instansi penting untuk menunjang kehidupan perekonomian bangsa. Pengurusan bank konvensional yang mengandung riba harus digantikan dengan bank Islam sehingga umat muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa takut akan dosa riba. Bank Islam sudah berdiri di berbagai negara-negara yang mayoritas muslim, sehingga Brunei Darussalam juga dianggap perlu mendirikan bank Islam.²⁰

Dari titah tersebut mengisyaratkan bahwa Sultan benar-benar ingin mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terkhusus bidang ekonomi. Sebagaimana terdapat dalam kitab suci al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang terjemahannya menyebutkan tentang haramnya riba,

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²¹

Kerjasama dengan Malaysia dilakukan oleh Sultan Hassanal Bolkiah guna melancarkan usaha pembentukan bank Islam di Brunei Darussalam. Sultan Brunei Darussalam berharap Malaysia dapat memberi bantuan tenaga-tenaga ahli untuk

²⁰Juned, *Islam di Brunei*, hlm. 185

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 47.

mengajari masyarakat Brunei Darussalam tentang pengelolaan bank Islam yang didirikan di Brunei Darussalam.²²

Pendirian bank Islam dimulai dari pembentukan Jawatankuasa Penubuhan Bank Islam Brunei Darussalam (JPBIBD) yang kemudian melakukan pertemuan-pertemuan. Pada September 1991 M, Sultan Hassanal Bolkiah meresmikan pembentukan bank Islam yang dinamakan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB). Pembentukan TAIB ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang dinamakan “Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Darussalam 1991”.²³ Pembukaan resmi TAIB dilakukan di Bangunan Perdagangan Bumiputera, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan. Tujuan utama pembentukan TAIB ini tidak terlepas dari usaha Sultan dalam menerapkan Islam sebagai cara hidup dan juga usaha untuk mengembangkan sosio-ekonomi umat Islam. Selain itu, Sultan juga hendak mengarahkan umat Islam agar uang yang akan digunakan berangkat haji dapat disimpan di lembaga keuangan yang bebas riba.²⁴ Pada perkembangannya, TAIB juga dibangun di beberapa wilayah lain di Brunei Darussalam seperti Belait, dan Tutong.

Sultan Hassanal Bolkiah tidak hanya mendirikan TAIB sebagai bank yang berbasis syariah Islam, Ia kemudian mengubah sistem bank konvensional yang sudah ada dengan sistem yang berdasarkan syariah Islam. Legalisasi kebijakan ini dituangkan dalam undang-undang baru yang dibuat tahun 1992 M yakni “The Islamic Banking Order, 1992”. Pasca pembentukan undang-undang ini yakni tahun 1993 M, Sultan memerintahkan The International Bank of Brunei untuk merujuk pada sistem berdasarkan syariah Islam, dan kemudian mengganti namanya menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Berhad atau The Islamic Bank of Brunei Berhad (IBB). Tahun 2000 M, Bank Pembangunan Brunei (DBB) juga diganti namanya menjadi Bank Pembangunan Islam Brunei (IDBB).

²²Juned, *Islam di Brunei*, hlm. 186.

²³Mohd Roselan bin Haji Mohd Daud, *Perbankan dan Kewangan Islam di Negara Brunei Darussalam: Perkembangan dan Cabaran-cabaran*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Hari Kebangsaan dengan tema Patriotisme Teras Keteguhan Negara “20 Tahun Merdeka: Pencapaian dan Hala Tuju”, di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Brunei Darussalam pada 12-14 Mei 2004, hlm. 2.

²⁴Juned, *Islam di Brunei*, hlm. 189-191.

3. Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)

Pada bulan Juli 2010 M, Sultan Hassanal Bolkiah menyampaikan titahnya untuk membentuk sebuah organisasi yang keuangan yang dianggap penting demi mengatur kestabilan keuangan negara. Lembaga keuangan tersebut dinamakan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD). Tujuan pendiriannya adalah untuk dapat bertanggungjawab terhadap dasar-dasar kebijakan moneter negara, termasuk menjadi pengawas keuangan negara Brunei Darussalam. Meskipun sudah direncanakan sejak pertengahan tahun 2010, AMBD baru resmi didirikan sejak 1 Januari 2011 melalui Titah Awal Tahun Baru Masihi 2011. Sultan menyampaikan akan mendirikan sebuah institusi keuangan untuk menjaga kestabilan dan keteraturan dalam pengaturan keuangan negara. Institusi tersebut dinamakan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD).²⁵

Pembentukan AMBD ini bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan di Brunei Darussalam. Upaya pemerintah Brunei Darussalam mencapai dan memelihara sistem keuangan yang sehat dan dinamis, dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat dan memulai reformasi sektor keuangan yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

F. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang menyangkut pengaturan anggaran pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan negara dapat diperoleh dari berbagai hal, termasuk sumber daya alam, pajak, dan lainnya. Meskipun sumber pendapatan utama Negara Brunei Darussalam berasal dari sumber daya alam (minyak dan gas alam), tetapi usaha Sultan untuk melakukan diversifikasi ekonomi juga cukup berimbas. Diversifikasi ekonomi menjadi sumber pendapatan alternatif karena cadangan minyak dan gas alam Brunei Darussalam dianggap sangat terbatas.

Pajak merupakan salah satu pembahasan penting dalam kebijakan fiskal. Di Brunei Darussalam terdapat beberapa pajak yang ditarik. Pajak tersebut antara lain pajak perusahaan, pajak rokok dan industri tembakau, pajak bumi, dan pajak barang-

²⁵<http://pmo.gov.bn/Lists/TITAH/NewDispform.aspx?ID=> diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

barang khusus. Sementara pajak pribadi, dan pajak terhadap masuknya bahan-bahan kebutuhan pokok tidak ditarik pajak.

1. Pajak Perusahaan

Pajak Perusahaan merupakan pajak yang ditarik oleh Pemerintah Brunei Darussalam kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di negara tersebut, baik perusahaan lokal maupun asing. Bagi penduduk Brunei Darussalam, pajak ditarik atas seluruh hasil pendapatan perusahaan, sementara bagi penduduk asing, pajak dikenakan atas pendapatan yang bersumber dari Brunei Darussalam atau keuntungan dari bisnis cabang yang didirikan di Brunei Darussalam. Tujuan penetapan pajak ini yakni untuk mengontrol keberadaan perusahaan agar tetap berada dalam kontrol pemerintah. Tarif pajak perusahaan ini fluktuatif sejak ditetapkan sebesar 30% pada tahun 2007. Angka ini berubah menjadi 27,5% pada tahun 2008. Tarif pajak berkurang lagi tahun 2009 menjadi 25,5% dan berubah lagi tahun 2010 menjadi 23,5%. Sejak tahun 2011, pajak perusahaan ditetapkan sebesar 22% dan terakhir pada tahun 2015 yang mana besaran pajak hanya 20%.²⁶

2. Pajak Rokok dan Industri Tembakau

Pajak rokok dan industri tembakau merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah Brunei Darussalam untuk mengontrol peredaran rokok di negara tersebut. Menurut pemerintah, kesehatan menjadi faktor yang cukup diperhatikan oleh pemerintah Brunei Darussalam. Sultan melakukan usaha-usaha dalam menjaga populasi Brunei Darussalam agar terhindar dari penyakit yang dianggap mengancam. Salah satu penyakit yang dianggap serius adalah penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dalam titahnya sejak tahun 1996 M, Sultan sering menyinggung regulasi untuk menekan distribusi tembakau dan rokok di Brunei Darussalam. Di samping itu, peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan juga dilakukan untuk menjaga harapan hidup masyarakat Brunei Darussalam yang notabene berpenduduk sedikit.

Usaha Sultan menekan konsumsi rokok di Brunei Darussalam dilakukan dengan beberapa upaya, seperti menandatangani *The WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC), menetapkan tarif pajak dan harga yang tinggi untuk

²⁶<http://www.mof.gov.bn/index.php/type-of-taxes/income-tax> diakses pada tanggal 27 November 2017.

tembakau dan rokok, dan lainnya.²⁷ Sejak tahun 2011, Sultan menetapkan keharaman rokok. Meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi berdasarkan penelitian mutakhir, rokok mengandung 4000 bahan kimia beracun, sehingga penggunaannya dianggap sebagai suatu hal yang sia-sia dan membahayakan kesehatan masyarakat Brunei Darussalam. Bagi para perokok, Sultan juga mendirikan Klinik Berhenti Merokok untuk menangani mereka yang benar-benar ingin berhenti merokok. Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah Brunei Darussalam untuk rokok terbilang cukup tinggi yakni mencapai 72%. Ini berarti setiap batang rokok dikenakan BND 0,25.²⁸

3. Pajak Bumi

Pajak lain yang pernah diterapkan di Brunei Darussalam adalah pajak bumi. Pajak bumi dibuat dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah tanah yang memiliki nilai BND3,000 hingga BND5,000 dikenakan pajak sebesar 1%. Sementara tingkatan kedua adalah tanah yang memiliki nilai lebih dari BND10 juta dikenakan tarif 20%. Pajak bumi dikenakan kepada semua barang tidak bergerak yang ada di Brunei Darussalam, dan barang-barang bergerak yang dimiliki seseorang yang tinggal di Brunei Darussalam. Selain itu pajak bumi ini juga dikenakan pada barang-barang yang berada di Brunei Darussalam meskipun pemiliknya tidak tinggal di Brunei Darussalam. Pajak bumi ini telah dihapuskan sejak 1 Januari 2013.

4. Pajak Lainnya

Sementara itu, Brunei Darussalam membebaskan bea ekspor, dan bea cukai, terutama pada bahan makanan serta barang untuk keperluan industri. Untuk barang khusus seperti alkohol, Brunei Darussalam telah mengaturnya dalam Excise Act tahun 2006. Meskipun penjualan alkohol merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi alkohol tidak dikenai pajak. Pajak lain yang ditiadakan di Brunei Darussalam adalah pajak pertambahan nilai.

Bea cukai dibebaskan agar biaya produksi industri lokal lebih rendah, sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

²⁷Hardi Alunaza, "Kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam Meratifikasi Th WHO Framework Convention on Tobacco Control", *Dauliyah Journal of Islamic and International Studies*, Volume 1, No. 2, Agustus 2016, hlm. 180-181.

²⁸Abdillah Ahsan, dkk, "Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan", laporan penelitian untuk Komisi Nasional Perlindungan Tembakau. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, hlm. 55-56.

Selain itu untuk mendorong penduduk Brunei Darussalam untuk melakukan aktivitas produksi untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat meninggalkan ketergantungan terhadap bahan impor. Sementara untuk barang khusus seperti alkohol diatur cukup ketat, sebagai salah satu usaha Sultan untuk menjadikan Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Brunei Darussalam.

G. PENGARUH TERHADAP BRUNEI DARUSSALAM

Kebijakan merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Tujuan utama pembentukan kebijakan tidak terlepas dari kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, negara secara umum juga dapat merasakan pengaruh dari penerapan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan ekonomi menjadi salah satu kebijakan yang pengaruhnya cukup dirasakan oleh negara.

Perekonomian Brunei Darussalam dijalankan berdasarkan Rancangan Kemajuan Negara (RKN). Sejak masa kemerdekaan, Brunei Darussalam telah membuat sebanyak 6 RKN, yakni RKN Kelima (1985-1990), RKN Keenam (1991-1995), RKN Ketujuh (1996-2000), RKN Kedelapan (2001-2005), RKN Kesembilan (2007-2012), dan RKN Kesepuluh (2012-2017). Meskipun tidak semua rencana-rencana dalam RKN dapat direalisasikan, namun RKN menjadi pedoman pengembangan perekonomian Brunei Darussalam.

Pengaruh yang dirasakan oleh negara terkait penerapan kebijakan ekonomi ini dapat berbentuk prestasi atau penghargaan, reputasi negara, peningkatan hubungan dengan negara lain, kepercayaan dari negara lain, dan lainnya. Pengaruh dapat berupa hal yang positif, maupun negatif. Pengaruh ini pun juga dirasakan Negara Brunei Darussalam ketika Sultan menerapkan aturan-aturan yang disesuaikan dengan dasar negara MIB. Upaya mengubah iklim perekonomian Brunei Darussalam yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh Inggris beralih menjadi perekonomian yang sesuai syariat Islam.

1. Pengaruh bagi Negara Brunei Darussalam

Kebijakan ekonomi Sultan Hassanal Bolkiah telah memberikan beberapa pengaruh positif bagi negara Brunei Darussalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh pertama adalah penghargaan bagi negara Brunei Darussalam di kancah internasional. Penghargaan didapat dalam beberapa kategori. Misalnya Brunei Darussalam menjadi negara terkaya keempat menurut *The Guinness Book of Records* berdasarkan pendapatan perkapita tahunan yakni USD17,000 pada tahun 1987.²⁹ Sepanjang tahun 1984-2008, sektor perindustrian Brunei Darussalam mengalami kadar rata-rata pertumbuhan 5,4% dalam setahun. Dengan sumbangan tertinggi pada tahun 1997 dan 2006 yakni mencapai 846 juta dolar.

Negara ini juga mendapat posisi nomer satu dalam kategori Kestabilan Makroekonomi pada tahun 2010 M. Survei ini dilakukan oleh *The World Economic Forum* dan dituangkan dalam sebuah laporan yakni *Global Competitiveness Report*. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Sultan Hassanal Bolkiah dalam Titah Sempena Hari Keputeraan KDYMM Yang Ke-64 Tahun pada Juli 2010 M, yang berbunyi,

... Alhamdulillah, satu berita memberangsangkan berdasarkan *The World Economic Forum's* (WEF) *Global Competitiveness Report 2008-2009*, negara kita telah menduduki tempat teratas dari sudut pengurusan hutang kerajaan, dengan mengambilk kira negara ini tidak mempunyai hutang awam, sementara itu, negara juga menempati kedudukan kedua daripada 134 buah negara dari aspek kekukuhan makroekonomi...³⁰

Pengaruh positif lainnya adalah meningkatnya hubungan Brunei Darussalam dengan negara lain. Reputasi ekonomi yang meningkat dan stabil menjadikan negara-negara lain memiliki kepercayaan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Sejak masa kemerdekaan tahun 1984, Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN, dan organisasi dunia seperti *Organisation of Islamic Conference* (OIC) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI), *The United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *The Commonwealth, the Non-Alignment Movement* (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB) sejak 1992, *World Trade Organisation* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Asia-Europe Meeting* (ASEM).

²⁹Ranjit Singh, "Brunei Darussalam in 1987: Coming to Grips With Economic and Political Realities". *Southeast Asian Affairs*, 1988, hlm 63.

³⁰pmo.gov.bn/Lists/TITAH/NewDispform.aspx?ID=126 diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

Selain pengaruh positif, terdapat pula pengaruh negatif yang muncul dari kebijakan ekonomi Sultan Hassanal Bolkiah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah reputasi keluarga Sultan yang terkenal hidup bermewah-mewahan, padahal di sisi lain, Sultan selalu menggembor-gemborkan hidup hemat bagi rakyatnya. Selain itu, sultan diketahui memiliki koleksi mobil-mobil mewah yang jumlahnya mencapai 7.000 unit. Bahkan salah satu mobil Rolls-Royce dilapisi dengan emas 24 karat. Istana Nurul Iman yang ditempati Sultan juga dikenal sebagai istana terbesar di dunia dengan luas 200.000 m².³¹

Gaya hidup bermewah-mewahan ini juga dijalani oleh keluarga Sultan, sehingga berpotensi untuk menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara. Sebab pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang keluarga kerajaan yakni, Pangeran Jefri Bolkiah (adik Sultan Hassanal Bolkiah). Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan Brunei Darussalam tahun 1990. Ia menggelapkan uang sebesar 8 miliar pounsterling dari Otoritas Investasi Brunei.³²

Pengaruh negatif lain yang muncul adalah pengaruh asing yang masih kuat terhadap kehidupan masyarakat Brunei Darussalam. Salah satu contoh dapat dilihat dari kebijakan Brunei Darussalam untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Cina terkait pembangunan infrastruktur dan daerah perindustrian. Berdasarkan perjanjian tersebut, Brunei Darussalam harus menerima syarat bahwa tenaga kerja untuk membangun infrastruktur dan daerah industri tersebut berasal dari Cina. Dengan demikian pemerintah Brunei Darussalam yang juga dalam proses mengurangi pengangguran justru tidak dapat mempekerjakan penduduknya sendiri. Terdapat banyak lagi pengaruh asing di Brunei Darussalam melalui adanya kerjasama-kerjasama bersyarat .

2. Pengaruh bagi Masyarakat Brunei Darussalam

Pengaruh positif atas penerapan kebijakan ekonomi Brunei Darussalam adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menurut Mohammad Parvez Imdad, seorang ekonom di Asia Tenggara departemen Asian Development Bank (ADB) yang dimuat oleh *The Brunei Times* mengatakan bahwa upaya untuk diversifikasi ekonomi Brunei akan kurang potensial karena laju pertumbuhan PDB yang rendah. Hal ini dikarenakan

³¹ <http://www.bornrich.com/sultan-haji-hassanal-bolkiah.html> diakses 24 April 2018

³² <https://www.vanityfair.com/news/2011/07/prince-jefri-201107> diakses 18 Mei 2018.

perekonomian Brunei Darussalam yang masih bergantung industri minyak dan gas.³³ Namun demikian upaya diversifikasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Brunei Darussalam tetap memiliki pengaruh positif bagi masyarakat. Melalui diversifikasi ekonomi ini, penduduk lokal dapat memperoleh pekerjaan baru yang layak sehingga penghasilan keluarga meningkat. Selain itu berdasarkan penelitian dari World Bank, Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki GDP tinggi, sehingga menjadikan standar hidup masyarakatnya tinggi.

Peningkatan pembangunan infrastruktur merupakan pengaruh positif yang kedua. Brunei Darussalam telah memiliki empat rumah sakit pemerintah yang tersebar di setiap distrik. Selain itu terdapat 2 rumah sakit swasta, 16 pusat kesehatan, 15 klinik kesehatan ibu dan anak, serta beberapa pelayanan kesehatan lainnya. Di bidang pendidikan, pembangunan sekolah juga semakin masif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2011, tercatat 255 institusi pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga universitas. Terdapat 79 taman kanak-kanak, 119 sekolah dasar, 5 sekolah persiapan Bahasa arab, 35 sekolah menengah, 11 sekolah kejuruan, dan 6 universitas.

Pada tahun 2010, Brunei Darussalam sudah memiliki jalan sepanjang 3.029,1 km. Selain itu sistem transportasi baik darat, laut maupun udara juga ditingkatkan kualitasnya. Perkembangan ekonomi di Brunei Darussalam juga menuntut pemerintah menyediakan sarana telekomunikasi yang baik. Maka dari itu pemerintah Brunei Darussalam sungguh-sungguh dalam mengembangkan pelayanan telekomunikasi di Brunei Darussalam. Melalui usaha diversifikasi ekonomi, Brunei Darussalam juga mampu mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara lain, mengembangkan potensi pariwisata, peningkatan proyek pabrik methanol, dan melanjutkan pengembangan proyek Taman Industrial Sungai Liang (SPARK), pengembangan produk halal, dan lainnya.³⁴

Pengaruh positif yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun dunia pekerjaan di Brunei Darussalam didominasi oleh pekerja asing, namun pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan partisipasi rakyatnya untuk mengisi kesempatan kerja yang telah disediakan. Usaha peningkatan kualitas

³³Munthe, "Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam", hlm. 108.

³⁴Christopher Roberts, dan Lee Poh Onn. "Brunei Darussalam: Cautious on Political Reform, Comfortable in ASEAN, Pushing for Economic Diversification", *Southeast Asian Affairs*, 2009, hlm. 75.

SDM dilakukan dengan penyediaan fasilitas pendidikan gratis dari taman kanak-kanak sampe perguruan tinggi. Selain itu peningkatan kesehatan masyarakat juga dilakukan. Melalui upaya diversifikasi juga dapat mengurangi pengangguran di Brunei Darussalam.

Pengaruh yang terakhir adalah pengamalan aturan Islam dalam kehidupan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan MIB sebagai landasan negara. Sultan terdorong untuk menjadikan seluruh kehidupan masyarakat Brunei Darussalam diatur oleh Islam, termasuk dalam kegiatan ekonominya. Salah satunya kebijakan tentang pendirian bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan masyarakat muslim dari riba. Selain itu ada kebijakan tentang pajak yang tinggi pada berbagai barang yang diharamkan.

Sementara itu di samping memiliki pengaruh positif, kebijakan ekonomi Sultan Hassanal Bolkiah juga menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat. Pertama, adanya transparansi ekonomi yang rendah. Hal ini muncul karena Brunei Darussalam merupakan negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki absolut, sehingga semua kendali berada di tangan sultan. Di negara ini tidak terdapat lembaga yang mengawasi Sultan, sehingga tidak ada audit terhadap pemasukan maupun pengeluaran negara. Selain itu sistem informasi yang tertutup di Brunei Darussalam menjadikan media jarang memberitakan informasi buruk tentang perekonomian negara. Media yang juga di bawah kendali Sultan selalu menampilkan berita dan informasi positif yang mendukung peningkatan reputasi negara.

Selain itu, dengan berbagai kebijakan pemerintah yang memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi-subsidi terhadap barang-barang tertentu menjadikan masyarakat memiliki semangat berkompetisi yang rendah. Misalnya ketika Sultan mengalokasikan dana pendidikan yang tinggi untuk pemenuhan pendidikan gratis di Brunei Darussalam. Kebijakan ini membuat setiap peserta didik merasa terjamin akan memperoleh pendidikan selanjutnya tanpa harus mendapatkan prestasi yang tinggi.

Peningkatan perilaku curang dalam masyarakat juga menjadi pengaruh negatif dari adanya kebijakan ekonomi pemerintah Brunei Darussalam. Perilaku curang dalam bentuk penyelundupan banyak dilakukan di Brunei Darussalam karena pemerintah menetapkan pelarangan terhadap beberapa komoditas yang memiliki nilai ekonomis

tinggi. Berdasarkan surat kabar Brunei Times, pada tahun 2014 telah terjadi penyelundupan alkohol ke daerah Belait, Brunei Darussalam berupa 84 botol bir dan 12 liter wiski. Atas tindakan tersebut, pelaku dikenai denda sebesar \$1300.³⁵

H. KESIMPULAN

Brunei Darussalam merupakan negara di Asia Tenggara yang masih mempertahankan sistem pemerintahan monarki absolut. Kekayaan alam berupa minyak dan gas alam menjadi tumpuan pendapatan negara. Meskipun demikian, Sultan Hassanal Bolkiah berusaha mengurangi ketergantungan Brunei Darussalam terhadap sumber daya alam tersebut dengan melakukan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi di sektor perindustrian menjadi fokus utama pemerintah. Dengan landasan negara berupa falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), Sultan membuat berbagai macam kebijakan untuk mengatur negaranya. Kebijakan-kebijakan ekonomi juga didasarkan pada ajaran Islam, seperti pendirian bank Islam, penetapan pajak yang tinggi pada komoditas yang diharamkan, serta mengembangkan industri pangan halal.

Kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan pengaruh baik positif dan negatif. Pengaruh positif berupa penghargaan bagi Brunei Darussalam di kancah internasional, peningkatan jalinan hubungan Brunei Darussalam dengan negara lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengamalan Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara pengaruh negatif dari penerapan kebijakan Sultan Hassanal Bolkiah antara lain berupa dualisme reputasi keluarga Sultan, pengaruh asing cukup tinggi, transparansi informasi ekonomi rendah, semangat berkompetisi rendah, dan peningkatan tindakan curang dalam masyarakat.

³⁵<https://btarchive.org/news/national/2016/07/01/malaysian-fined-3-000-smuggling-alcobol>
diakses 27 Juni 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara, jilid V*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Ahsan, Abdillah, dkk. "Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan", laporan penelitian untuk Komisi Nasional Perlindungan Tembakau. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
- Alunaza, Hardi. "Kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam Meratifikasi Th WHO Framework Convention on Tobacco Control". *Dauliyah Journal of Islamic and International Studies*, Volume 1, No. 2, Agustus 2016.
- Al-Sufri, Awang Mohd. Jamil. *Melayu Islam Beraja: Hakikat dan Hasrat*. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2008.
- Daud, Mohd Roselan bin Haji Mohd. "Perbankan dan Kewangan Islam di Negara Brunei Darussalam: Perkembangan dan Cabaran-cabaran", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Hari Kebangsaan dengan tema Patriotisme Teras Keteguhan Negara "20 Tahun Merdeka: Pencapaian dan Hala Tuju", di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Brunei Darussalam pada 12-14 Mei 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departement of Information, *Brunei in Brief*. Brunei Darussalam: Departement of Government Printing, 2013.
- Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)". *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 7, No.1 Januari-Juni 2015.
- Islam, Saiful, dan Zawawi Bahari. "Energi Commodities for Economic Growth of Brunei Darussalam". Makalah disampaikan dalam Third IAEE Asian Conference, International Association of Energy Economics dengan tema "Growing Energy Demand, Energy Security and the Environment in Asia". Jepang, 20-22 Februari 2012.
- Jabatan Penerangan. *Kumpulan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tahun 2012*. Brunei Darussalam: Borneo Printers & Trading Sdn Bhd, 2015.
- Juned, Awang Abdul Aziz bin Awang. *Islam di Brunei: Zaman Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam*. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1992.
- Kamis, Abdul Malik dan Thirunaukarasu Subramaniam. "Sejarah Ekonomi Negara Brunei Darussalam". *JATI*, Volume 21, Desember 2016.

- Kaseh, Noor Hira Binti Haji Noor. “Keharmonisan Asas Pembangunan Ummah di Negara Brunei Darussalam”. Makalah disampaikan pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) ke-38 pada 28-30 Oktober 2013.
- Munthe, Salman. “Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1, No. 2, September 2015.
- Pelita Brunei. 5 Juli 2017.
- Pew Research Center. “The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010”. Washington D.C., 2012.
- Roberts, Christopher dan Lee Poh Onn. “Brunei Darussalam: Cautious on Political Reform, Comfortable in ASEAN, Pushing for Economic Diversification”. *Southeast Asian Affairs*, 2009.
- Ruliyadi. “Brunei Darussalam di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V (1485-1524)”. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2011. Tidak dipublikasikan.
- Shiddiqui, Shamim A., dkk. “Economic And Social Policies of Brunei: An Empirical Analysis”. *Philippine Review of Economics and Business*, Volume XXXIII, No. 1, Juni 1996.
- Singh, Ranjit. “Brunei Darussalam in 1987: Coming to Grips With Economic and Political Realities”. *Southeast Asian Affairs*, 1988.

Sumber Online:

- <https://btarchive.org/news/national/2016/07/01/malaysian-fined-3-000-smuggling-alcohol>
- <http://dcyberinfo.blogspot.co.id/2012/06/gambar-keluarga-diraja-brunei.html>
- <http://pmo.gov.bn/Lists/TITAH/NewDispform.aspx?ID=>
- <http://www.ambd.gov.bn/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?>
- <http://www.bornrich.com/sultan-haji-hassanal-bolkiah.html>
- <http://www.mof.gov.bn/index.php/type-of-taxes/income-tax>
- <https://www.vanityfair.com/news/2011/07/prince-jefri-201107>